

BAB I

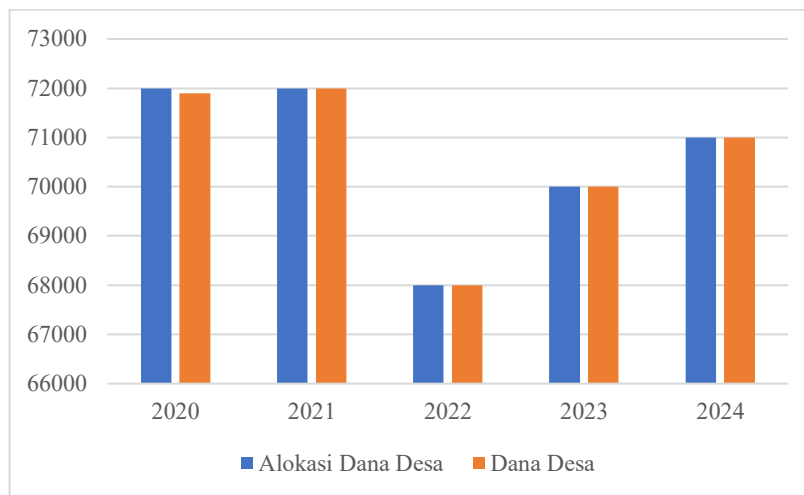
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa pada hakikatnya merupakan tempat tinggal sekaligus tanah kelahiran bagi komunitas masyarakat kecil dan memiliki keterikatan yang kuat dengan wilayah tempat mereka bermukim (Sofianto et al., 2024). Selain sebagai tempat tinggal, keterikatan tersebut mendorong mereka untuk menyangga kehidupan bersama. Desa juga menjadi cikal bakal tumbuhnya struktur masyarakat politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia yang telah berlangsung sejak lama, bahkan mendahului lahirnya konsep negara modern (Sofianto et al., 2024).

Pembangunan perdesaan di era modern menggunakan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa atau pembangunan desa berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan yang selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah (Yulitasari & Tyas, 2020).

Desa memiliki kewenangan dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan desa yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional (Permatasari dalam Halim & Taryani, 2023). Pemerintah Pusat melakukan desentralisasi fiskal yaitu penyaluran dana desa, sebagai bentuk dukungan finansial bagi implementasi pembangunan. Dana desa menjadi faktor utama dalam pembangunan desa untuk mengatasi *problematika* yang ada.



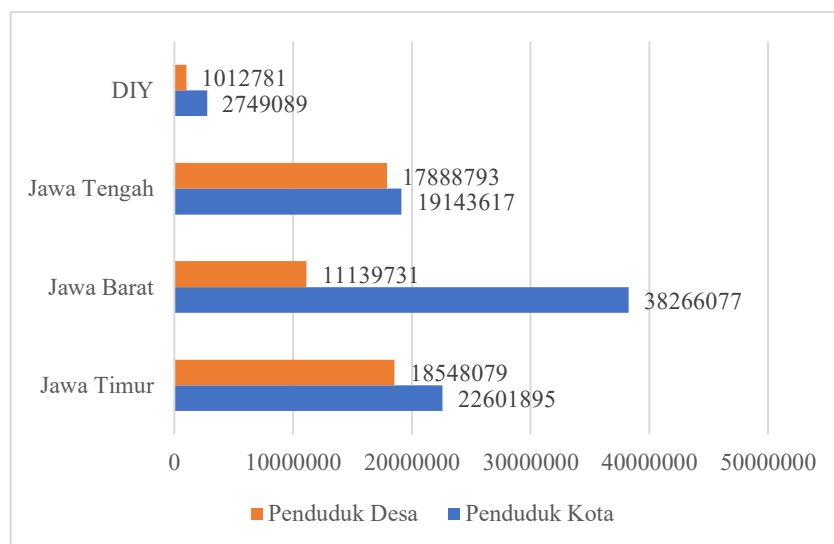
Gambar 1. Grafik Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2020 - 2021

(RAPBN) Tahun 2024, pemerintah pusat menganggarkan 71 triliun untuk dana desa. Nilai tersebut meningkat sebesar 1,43% lebih tinggi dibandingkan *outlook* 2023 yang sebesar 67,9 triliun. Fokus penggunaan dana desa pada tahun 2024, sebagai fondasi utama dalam mendorong keberlanjutan pembangunan desa serta menanggulangi kemiskinan ekstrem secara lebih efektif. Penetapan jumlah dana desa yang disalurkan ke daerah, ditinjau berdasarkan beberapa indikator yaitu 50% angka kemiskinan, 30% jumlah desa, dan 20% luas wilayah atau tingkat kompleksitas geografis masing-masing desa (Susilo dalam Rezkia & Yunani, 2023).

Salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat berdampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga bertambahnya perilaku konsumtif dan penciptaan lapangan kerja (Umamah & Syafitri, 2025). Pertumbuhan jumlah penduduk memegang peranan strategis dalam mendorong dinamika pembangunan dan perkembangan suatu wilayah.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan di suatu wilayah apabila diimbangi dengan perencanaan

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Anggun A Farinatae & Sharon, 2025). Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam perencanaan pembangunan.



Gambar 2. Jumlah Penduduk Desa dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2022

Merujuk pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2022, diketahui bahwa mayoritas penduduk di Pulau Jawa cenderung memilih menetap di wilayah perkotaan dibandingkan di kawasan perdesaan. Menurut data, jumlah penduduk desa di Provinsi Jawa Timur sebanyak 18.548.079 jiwa. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak jika dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang memilih tinggal di kota dikarenakan masih banyaknya permasalahan di desa seperti terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, ketimpangan pembangunan infrastruktur dengan daerah perkotaan dan minimnya akses teknologi serta digitalisasi. Secara alamiah, perbedaan jumlah penduduk di suatu wilayah dan mengalami peningkatan populasi

penduduk akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja (Simbolon et al., 2024).

Optimalisasi potensi desa menjadi instrumen utama dalam mencapai kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Farhana & Mutaqi, 2023). Salah satu sektor potensial di desa yaitu sektor ekonomi, karena memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan sektor lain dalam kehidupan masyarakat dan menjadi basis perekonomian suatu wilayah (Iskandar dalam Farhana & Mutaqi, 2023)

Sektor ekonomi menjadi pilar yang sangat penting dalam pembangunan nasional, menjadi penggerak utama dalam mewujudkan kualitas masyarakat desa (Rattu et al., 2022). Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi untuk bersama-sama dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa (Margayaningsih dalam Novriza et al., 2024).

Dalam konteks pengukuran kemajuan suatu desa, IDM digunakan untuk instrumen komprehensif penilaian tingkat perkembangan dan keberlanjutan pembangunan desa (Afifah et al., 2023). Menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, 2016), IDM dibentuk dari tiga instrumen penting yaitu aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui pengukuran IDM, berbagai persoalan desa dapat segera diatasi dan manifestasi tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan jumlah desa mandiri dapat tercapai (Novita Sari, 2020).

Permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan capaian tujuan pembangunan tersebut adalah masih besarnya jumlah desa yang belum berhasil mencapai status sebagai desa mandiri, sebagaimana diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah status desa mandiri yang masih rendah adalah Kabupaten Ponorogo.

Tabel 1. Data IDM Kabupaten Ponorogo Tingkat Kecamatan Tahun 2024

Nama Kecamatan	Nilai IDM	Status Desa
Jenangan	0,8330	Mandiri
Ngebel	0,8251	Mandiri
Kauman	0,8173	Mandiri
Babadan	0,8149	Maju
Jetis	0,7860	Maju
Slahung	0,7811	Maju
Sawoo	0,7760	Maju
Siman	0,7666	Maju
Sampung	0,7659	Maju
Jambon	0,7643	Maju
Mlarak	0,7641	Maju
Sambit	0,7628	Maju
Balong	0,7546	Maju
Sukorejo	0,7537	Maju
Sooko	0,7530	Maju
Badegan	0,7530	Maju
Ngrayun	0,7502	Maju
Pulung	0,7257	Maju
Pudak	0,7207	Maju
Bungkal	0,7181	Maju

Sumber : Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

Hasil rekapitulasi data di atas menunjukkan bahwa status desa mandiri di Kabupaten Ponorogo masih sangat sedikit. Pada tahun 2024 dari total 20 Kecamatan hanya Kecamatan Jenangan, Ngebel dan Kauman yang mencapai status desa mandiri dengan rata-rata nilai IDM di atas 0,8170. Sedangkan Kecamatan Bungkal, Kecamatan Pudak, dan Kecamatan Pulung berada di tiga urutan terakhir dalam peringkat IDM.

Perbedaan klasifikasi status desa menurut IDM di Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya potensi ekonomi desa yang berbeda di masing-masing wilayahnya. Salah satu potensi ekonomi desa yang memiliki berperan strategis dalam meningkatkan status desa adalah komoditi unggulan desa (Novriza et al., 2024).

Tabel 2. Data Potensi Ekonomi Desa di Kabupaten Ponorogo

Tahun	Pertanian (Produksi Hasil Pertanian/Ton)	Perkebunan (Produksi Hasil Perkebunan/Ton)	Perikanan (Produksi Hasil Perikanan/Ton)	Total Produksi
2020	451.538,00	3.981,81	1.948,31	457.468,12
2021	447.455,00	4.776,81	1.681,42	453.913,23
2022	448.011,00	4.520,98	1.766,85	454.298,83
2023	444.676,10	5.831,58	1.859,72	452.367,43
2024	443.126,40	6.323,71	1.939,49	451.389,61

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data di atas, di Kabupaten Ponorogo mempunyai potensi ekonomi desa yang terus meningkat di setiap tahunnya. Potensi ekonomi desa di Kabupaten Ponorogo dapat dibagi menjadi potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Total produksi dari masing-masing sektor tersebut, mengalami

penurunan dalam kurun waktu terakhir yaitu 2020-2024. Nilai tertinggi hasil total produksi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 457.468,12 ton, dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Optimalisasi potensi ekonomi desa secara maksimal, yang didukung oleh tata kelola dana desa yang efektif dan transparan diharapkan dapat mengatasi permasalahan berbagai persoalan yang ada dan mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian terdahulu masih sebatas pada Analisis Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap IDM (Iftitah & Wibowo, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Desa, Jumlah Penduduk dan Potensi Ekonomi Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 – 2024”.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagai bagian dari instrumen pembangunan, variabel Dana Desa, Jumlah Penduduk dan Potensi Ekonomi Desa perlu dilakukan uji dampaknya berdasarkan pengukuran IDM. Merujuk pada latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo selama periode 2015 hingga 2024 ?.
2. Bagaimana pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo selama periode 2015 hingga 2024 ?.

3. Bagaimana pengaruh variabel Potensi Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo selama periode 2015 hingga 2024 ?.
4. Bagaimana pengaruh variabel Dana Desa, Jumlah Penduduk dan Potensi Ekonomi Desa secara bersama - sama terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo selama periode 2015 hingga 2024 ?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh variabel Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 hingga 2024.
- b. Mengetahui pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 hingga 2024.
- c. Mengetahui pengaruh variabel Potensi Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 hingga 2024.
- d. Mengetahui pengaruh variabel Dana Desa, Jumlah Penduduk dan Potensi Ekonomi Desa secara bersama - sama terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 hingga 2024.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan tercapai manfaat yang dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis antara lain:

- a. Sebagai upaya menambah literatur pengembangan keilmuan terkait dengan pengelolaan dana desa, jumlah penduduk dan potensi ekonomi desa.
- b. Sebagai upaya memberikan saran kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana desa, pemanfaatan jumlah penduduk dan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM).
- c. Sebagai referensi dalam memperluas cakupan kajian pada penelitian selanjutnya.

